

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Ketertarikan penulis untuk memahami lebih lanjut mengenai studi kawasan Asia Tenggara merupakan langkah awal dari penulisan skripsi ini. Bagi penulis kawasan Asia Tenggara memiliki keunikan tersendiri sebagai suatu komunitas regional. Kawasan mempunyai posisi strategis baik secara geografis maupun secara fungsional. Selain letaknya yang strategis dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Namun, Asia Tenggara merupakan kawasan yang rawan akan terjadinya konflik baik dalam lingkup domestik maupun regional.

Dari ketertarikan terhadap kawasan Asia Tenggara penulis akan lebih memfokuskan bahasan tentang salah satu negara di Asia Tenggara, yang saat ini menjadi negara yang mempunyai pengaruh cukup besar, yaitu Malaysia. Malaysia adalah salah satu negara bekas jajahan Inggris yang ada di kawasan Asia Tenggara, selain itu Malaysia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah dan penduduk yang terdiri dari berbagai macam suku (*multietnis*), dan negara yang paling dekat dengan Malaysia adalah Indonesia, baik yang berbatasan darat maupun berbatasan laut.

Indonesia adalah negara yang memiliki persamaan sosial dan budaya yang paling dekat dengan Malaysia, dan sering dikatakan bahwa Indonesia dan Malaysia adalah negara...

semuanya menjadi sama, ada faktor-faktor lain yang secara prinsip membuatnya berbeda.

Hubungan antara Indonesia dan Malaysia terbilang harmonis, hal itu dikarenakan letak geografis yang dekat antara Indonesia dan Malaysia. Walaupun bukan merupakan satu-satunya faktor, kedekatan geografis ini merupakan faktor penting yang tidak boleh untuk dilupakan, yaitu bahwa Indonesia dan Malaysia terlahir sebagai negara yang hidup berdampingan satu dengan lainnya.

Dengan kedekatan timbullah rasa saling ketergantungan yang tensinya cukup tinggi diantara kedua negara tersebut, *interdependence* atau rasa saling ketergantungan membuat Malaysia dan Indonesia memiliki rasa saling percaya (*trust*) dalam melakukan kerjasama disegala bidang termasuk bidang-bidang yang strategis.

Dalam hal ini Malaysia memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap Indonesia, baik yang bersifat positif maupun yang negatif bagi Malaysia. Positif biasanya yang berhubungan dengan bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, keagamaan, dan lainnya, sedangkan yang negatif biasanya berhubungan dengan politik, geografis, keamanan, dan lainnya. Hal ini tampak dalam beberapa contoh kasus yang masuk dalam kategori positif, yakni tentang ketergantungan Malaysia atas tenaga kerja, target ekspor, kerjasama budaya dan IPTEK, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengenai alur negatifnya, pada dasarnya tidak kemudian tentang politik, geografis, keamanan, dan sebagainya, namun banyak kasus yang terkait bidang itu menjadi masalah. Politik misalnya, sejak masa Sukarno (ada lama) Indonesia mempunyai masalah politik dengan

Malaysia, kemudian tentang geografis, misal yang paling akhir adalah kasus Sipadan dan Ligitan yang dimenangkan oleh Malaysia dalam sidang ICJ, dan tentang keamanan adalah misal ancaman terorisme, dan sebagainya. Namun demikian itu semua sangat fluktuatif, jadi dalam semua bidang itu tidak jarang menimbulkan masalah sehingga tidak selalu seperti terurai di atas, bisa jadi yang sebelumnya menimbulkan dampak positif menjadi negatif seperti kasus TKI, dan begitu pula sebaliknya. (Narta, 1999)

Fenomena-fenomena tersebut sangat menarik untuk diamati dan dideskripsikan ke dalam skripsi ini, dengan memperhatikan penjelasan di atas maka penulis merasa judul yang pantas diberikan dalam membahas masalah ini adalah **“HUBUNGAN BILATERAL MALAYSIA - INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN PERDANA MENTERI MAHATHIR MOHYDIN 2001-2003”**





di desa sebagai petani, dan sejumlah kecil tinggal di kota sebagai pegawai atau politisi. Orang-orang Cina kebanyakan berdiam di kota dan berkecimpung di bidang perdagangan, sedangkan golongan India / Pakistan banyak yang bekerja di perkebunan, buruh kereta api, atau di bidang profesi.

Karena masing-masing kelompok seolah-olah hidup dalam dunia mereka sendiri-sendiri, maka politik di Malaysia senantiasa dipengaruhi oleh menonjolnya perasaan, kepentingan, dan tuntutan komunal masing-masing. Karena di dalam tiap-tiap komunal terjadi pula persaingan-persaingan politik, maka biasanya hal tersebut justru memperkuat sifat-sifat komunalisme tersebut. Sebagai contoh misalnya ketika ada kecenderungan para politisi akan memperjuangkan nasib kelompoknya masing-masing, baik politisi Melayu, Cina, juga India. Kelangsungan kehidupan sistem politik dalam kondisi seperti ini sangat tergantung pada kemampuannya mengatur perasaan, kepentingan, dan tuntutan yang saling berbeda dan mungkin ada yang bertentangan sehingga masing-masing kelompok komunal, paling jarang sebagian terpenting dari anggotanya, merasa puas.<sup>1</sup>

Akibat dari pluralnya bangsa Malaysia tersebut mengakibatkan terjadinya 'klik-klik' dalam tubuh sistem politik Malaysia dan hal itu berimbas pada terbentuknya pengelompokan suku bangsa di Malaysia pada suatu partai politik. Adapun konfigurasi adalah suku bangsa melayu lebih cenderung memilih UMNO (United Malay Nation Organization), orang-orang atau etnis keturunan Cina bergabung dalam MCA (Malayan Chinese Association), sedangkan

kelompok minoritas lainnya yaitu India membentuk partai MIC (Malaysian Indian Congress). Dari ketiga partai ini, dalam perkembangannya partai UMNO adalah partai yang mempunyai pengaruh paling besar.

Kemudian dari sisi ekonomi, Malaysia adalah salah satu negara berkembang di Asia Pasifik yang perkembangan ekonominya cukup mengesankan. Ini bisa kita lihat dari pertumbuhan ekonominya yang mencapai 8% per tahun. Kondisi ini tidak lepas dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia terutama pada masa pemerintahan perdana menteri Dr. Mahathir Mohammad.

Sebelum Mahathir Mohammad berkuasa tahun 1981, PDB Malaysia baru 12 miliar dollar AS. Tahun 2002, angka ini sudah membengkak berkali-kali lipat menjadi 210 miliar dollar AS. Sementara, pendapatan per kapita per tahun dewasa ini tercatat yang ketiga tertinggi di Asia Tenggara, setelah Brunei Darussalam dan Singapura, yakni sekitar 3.540 dollar AS tahun 2002 dan 3.780 dollar AS tahun 2004.<sup>2</sup>

Malaysia merupakan negara yang terdiri atas negara-negara bagian, yang setiap negara-negara bagian tersebut memiliki hak otonomi untuk menjalankan sistem pemerintahan masing-masing, namun dalam bidang pertahanan dan keamanan masih berada di bawah naungan pemerintah federal. Untuk menanggulangi masalah keamanan, Malaysia sering mengajak Indonesia (sebagai negara terdekat dan sahabat penting) untuk melaksanakan latihan militer.

---

<sup>2</sup>PDB Malaysia (diakses tanggal 28 April 2005), dari:  
<http://www.kompass.com/ekonomi/ekonomi-malaysia/>

Dalam masa pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohammad hubungan antara Malaysia dan Indonesia terbilang harmonis walaupun ada beberapa konflik-konflik dan ketegangan-ketegangan yang terjadi tetapi hal tersebut tidak membuat kedua negara terseret ke dalam peperangan. Pada masa tersebut Perdana Menteri Mahathir Mohammad bersama UMNO sangat dominan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan baik dalam maupun luar negerinya.

Dr. Mahathir Mohammad selaku Perdana Menteri sekaligus politisi senior Malaysia sangat paham tentang apa yang dibutuhkan oleh bangsa Malaysia. Dan strategi-strateginya selalu membawa perubahan yang signifikan bagi pembangunan baik yang berupa materi maupun non materi bagi bangsa Malaysia.

Dr. Mahathir Mohammad bersama partai UMNO sangat didukung oleh sebagian besar rakyat Malaysia dalam mengambil kebijakan-kebijakan strategisnya dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Barisan Nasional yang menjadi kendaraan politik Mahathir selama ini, membuatnya dapat menguasai pemerintahan selama puluhan tahun, di mana keberadaannya selalu didukung oleh kekuatan media massa. Hal itu dikarenakan Barisan Nasional mengontrol media massa Malaysia mulai dari kantor berita Bernama, harian The Strait Times, The Star, Berita Harian, hingga saluran TV3 dan NTV7.<sup>3</sup>

Strategi Mahathir lainnya dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintahan Malaysia adalah dengan menekan kelompok oposisi di Malaysia. Dalam upayanya Mahathir selalu berusaha untuk menekan kelompok oposisi dengan cara mendiskreditkan kelompok oposisi. Mahathir mengemukakan



dimulai sejak lama yaitu sejak Malaysia (yang didukung Britania) dipimpin oleh Perdana Menteri Tun Abdul Rahman dan Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada masa tersebut hubungan kedua negara diwarnai konfrontasi meskipun ada kerjasama-kerjasama yang saling menguntungkan. Konfrontasi terjadi pada tahun 1962-1966, mengenai masa depan pulau Kalimantan. Perang ini berawal dari keinginan Britania untuk menggabungkan koloninya (Brunei, Sabah dan Sarawak) dengan Malaysia pada tahun 1961. Pada waktu itu, Kalimantan dibagi menjadi empat administrasi. Kalimantan, sebuah provinsi di Indonesia, terletak di selatan Kalimantan. Di Utara adalah Kerajaan Brunei dan dua koloni Inggris, yaitu Sarawak dan Britania Borneo Utara (kemudian dinamakan Sabah). Namun, rencana tersebut ditentang oleh Pemerintahan Indonesia, Presiden Soekarno yang menganggap Malaysia hanya sebagai "boneka" Britania, dan konsolidasi Malaysia itu hanya akan menyebabkan pengaruh Britania yang membesar atau menambah kontrol Britania di kawasan tersebut, sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia.

Pada 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Pada 12 April, sukarelawan Indonesia (sepertinya pasukan militer tidak resmi) mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan dan sabotase. Pada 27 Juli, Sukarno mengumumkan bahwa dia akan meng-"ganyang Malaysia". Pada 16 Agustus, pasukan dari Brigade Gurkha berhadapan dengan lima puluh gerilyawan Indonesia. Meskipun Filipina tidak turut serta dalam perang, mereka memutarakan hubungan diplomatik

dengan Malaysia. Federasi Malaysia resmi dibentuk pada 16 September 1963. Brunei menolak bergabung dan Singapura keluar di kemudian hari. Ketegangan berkembang antara kedua belah pihak di Selat Malaka. Pada 1964 pasukan Indonesia mulai menyerang wilayah di Semenanjung Malaya. Ketika PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Sukarno menarik Indonesia dari PBB dan mencoba membentuk Konferensi Kekuatan Baru (Conference of New Emerging Forces, CONEFO) sebagai alternatif. Sebagai tandingan Olimpiade, Soekarno bahkan menyelenggarakan GANEFO (Games of the New Emerging Forces) yang diselenggarakan di Senayan, Jakarta pada 10-22 November 1963 yang diikuti oleh 48 negara di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika Selatan.

Menjelang akhir 1965, Jendral Suharto memegang kekuasaan di Indonesia setelah berlangsungnya kudeta. Oleh karena konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia menjadi berkurang dan peperangan pun mereda. Pada 28 Mei 1966 di sebuah konferensi di Bangkok, pemerintahan Malaysia dan Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik. Kekerasan berakhir bulan Juni, dan perjanjian perdamaian ditanda tangani pada 11 Agustus dan diresmikan dua hari kemudian.<sup>4</sup>

Dengan penjelasan di atas tampak bahwa hubungan bilateral antar keduanya mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat lewat indikator yaitu perbaikan-perbaikan hubungan di berbagai bidang kehidupan.

Indonesia sebagai sebuah negara terdekat dan terbesar yang secara langsung berbatasan dengan Malaysia, membuat Perdana Menteri Mahathir

Mohammad menaruh perhatian yang cukup besar di bidang politik. Terutama kebijakan politik luar negeri Indonesia yang seringkali membuat Malaysia resah, karena tidak jarang kebijakan politik luar negeri Indonesia 'sedikit' merugikan kepentingan Malaysia. Tetapi sering pula kebijakan politik Indonesia memberikan keuntungan kepada Malaysia.

Hubungan politik antara kedua negara tersebut diwujudkan dengan kerjasama politik antara dua partai besar yaitu partai UMNO, partai terbesar dan sangat berpengaruh dalam pemerintahan di Malaysia dan GOLKAR, partai yang telah berkuasa dan mengatur pemerintahan selama puluhan tahun di Indonesia. Kedekatan dua partai besar dalam dua negara besar di wilayah Asia Tenggara, ini tentu saja ada faktor kedekatan para pemuka atau tokoh dalam partai tersebut. Dalam hal ini tentu sosok Mahathir di UMNO dan Soeharto di GOLKAR menjadi faktor penting terjadinya hubungan dekat ini. Malaysia, dalam hal ini Mahathir bersama UMNO melihat bahwa GOLKAR adalah partai yang memiliki visi dan misi yang kurang lebih sama dengan yang dimiliki UMNO dan kebetulan pula kedua partai tersebut sebelum pergantian millenium memimpin pemerintahan di kedua negara tersebut. Sehingga pemerintahan Malaysia melihat bahwa dengan kerjasama yang erat diantara kedua partai besar tersebut, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tentunya tidak akan merugikan posisi dan kepentingan Malaysia. Adapun contoh yang dapat kita ambil dari kedekatan hubungan bilateral dua negara ini yang terkait dengan masalah politik dapat kita ambil contoh yaitu

.....

menyepakati untuk membantu korban perang teluk melalui mekanisme internasional yaitu PBB.

Dari aspek ekonomi, Malaysia dalam hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dibuat oleh Mahathir, sangat memprioritaskan Indonesia sebagai *partner* utamanya. Selain itu, hal tersebut tidak terlepas dari pangsa pasar yang potensial bagi produk-produk Malaysia, lebih dari itu Indonesia merupakan ladang investasi bagi para pengusaha Malaysia, seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan batubara, pertambangan minyak, perusahaan tekstil, industri elektronik, dan lainnya.

Di dalam negeri Malaysia sendiri, Mahathir beranggapan bahwa Malaysia sangat membutuhkan tenaga kerja Indonesia. Malaysia memiliki banyak industri disektor perkebunan yang membutuhkan banyak pekerja untuk menjalankan kegiatan industri tersebut. Tenaga kerja Indonesia menjadi pilihan utama disebabkan oleh beberapa hal, pertama persamaan karakter bahasa Indonesia dan Melayu, sehingga membuat para pengusaha Malaysia dan para pekerja Indonesia tidak mengalami kesulitan berkomunikasi, kedua adalah mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga memudahkan terjadinya interaksi antara tenaga kerja Indonesia dan masyarakat Malaysia. Dan yang ketiga adalah upah tenaga kerja Indonesia relatif rendah dan murah, sehingga para pengusaha Malaysia dapat mengurangi beban pengeluaran dari segi pembiayaan upah karyawan.

Pada aspek pertahanan dan keamanan Malaysia menjadikan Indonesia sebagai "kawan" dan "lawan". Sebagai sebuah negara terdekat dan "tetangga

itu digambarkan sebagai selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaannya. Mereka bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijaksanaan yang mungkin dilakukan dan semua sumber-sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.<sup>7</sup>

Model ini sangat terkenal terutama karena asumsi rasional yang dikandungnya. Para pembuat keputusan dianggap rasional dan kita umumnya cenderung berpikir bahwa keputusan (terutama yang menyangkut politik luar negeri) dibuat secara rasional. Karena itulah model ini paling sering diterapkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan politik luar negeri. Kebijakan yang diambil/politik luar negeri yang dilaksanakan merupakan pilihan yang layak mengingat tujuan-tujuan strategis dari bangsa tersebut yang pasti menguntungkan tujuan/kepentingan nasionalnya.

Sebagai aplikasi pada penulisan skripsi ini dapat dilihat bahwa dengan menggunakan teori pembuatan keputusan dari William D. Coplin dan Model Aktor Rasional dari Graham T. Allison ini, proses mewujudkan kepentingan strategis Malaysia terhadap Indonesia pada masa pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohammad dapat dijabarkan sebagai berikut.

Seperti yang telah kita ketahui, Politik Luar Negeri Malaysia terhadap Indonesia dibuat oleh Perdana Menteri Mahathir Mohammad pada masa pemerintahannya sangat dipengaruhi oleh pertimbangan kondisi politik dalam

---

<sup>7</sup> Graham T. Allison, *Essence of Decision* (Little, Brown, 1971); "Conceptual Model's and the Cuban Missile Crisis," *American Political Science Review* (September 1969); dan Allison

negeri Malaysia termasuk faktor budaya dan perilaku politik masyarakatnya. Kondisi politik dalam negeri Malaysia sangat stabil, hal ini bisa dilihat dari tidak adanya protes dari warga seperti demonstrasi dalam skala besar (people power) sebagai protes terhadap kebijakan yang tidak populer bagi warga negara Malaysia. Selain itu juga bisa dilihat selama masa pemerintahan Mahathir Mohammad tidak ada konflik horizontal yang signifikan, artinya yang sampai kemudian berdampak luas pada kondisi keamanan dalam negeri Malaysia. Kalaupun ada protes seperti tuntutan dari para pengikut Anwar Ibrahim agar membebaskan Anwar Ibrahim, itupun masih merupakan protes dalam batas-batas tertentu. Selanjutnya mengenai konflik etnis, mengingat Malaysia merupakan negara yang multikultur, selama masa Mahathir relatif tidak terjadi. Fakta inilah yang membawa Malaysia pada kondisi politik yang stabil. Ekonomi dan militer negara Malaysia termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam hal pertahanan dan keamanan mengingat Malaysia dan Indonesia berbatasan secara langsung. Kondisi perekonomian Malaysia seperti yang kita ketahui sangat maju, khususnya dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini bisa kita lihat dari pendapatan perkapita dan perkembangan infrastruktur yang pesat. Malaysia juga mempunyai pertahanan militer yang memadai sebagai alat keamanan negara dan lebih dari itu untuk mengantisipasi masalah keamanan, Malaysia juga bekerjasama dengan negara yang berbatasan langsung dengannya. Secara konteks internasional, posisi Malaysia cukup strategis untuk melakukan berbagai macam kebijakan luar negeri guna mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini

internasional yang membahayakan kondisi dalam negerinya, contohnya ketika isu terorisme meruak ke permukaan, di mana dua orang pelaku teror paling berbahaya yaitu Dr. Azahari dan Mohammad Nordin Top merupakan warga negara Malaysia dan disinyalir bahwa Malaysia merupakan pusat pelatihan kegiatan terorisme di Asia Tenggara selain Filipina, hal tersebut tidak serta merta membuat Malaysia mendapat tekanan-tekanan yang signifikan dari negara-negara lain seperti mendapat kecaman dari negara *super power* dan *travel warning* dari negara lainnya. Hal itulah yang membuat Perdana Menteri Mahathir Mohammad dapat berpikir secara rasional dalam membuat setiap keputusannya. Kebijakan yang diambil merupakan pilihan yang paling layak mengingat tujuan terhadap Indonesia dari negara Malaysia sangat menguntungkan kepentingan nasionalnya.

Sebagai penjelasan Teori pembuatan keputusan dan Model Aktor Rasional tersebut dapat kita lihat uraian sebagai berikut : Masih segar dalam ingatan kita semua bagaimana pulau Sipadan dan Ligitan diperebutkan oleh kedua negara ini. Baik Malaysia maupun Indonesia mengklaim bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah teritorialnya. Dalam hal ini Perdana Menteri Mahathir Mohammad merasa perlu mengambil berbagai langkah diplomatis untuk mempertahankan dua pulau tersebut adalah: karena wilayah merupakan kekuatan nasional, di mana seperti kita ketahui bahwa menguatnya kekuatan nasional mempunyai korelasi positif terhadap menguatnya suatu negara bangsa.

Langkah ini tentu saja didukung oleh beberapa faktor penting seperti yang dikemukakan teori pembuat keputusan yang telah disebutkan sebelumnya. Secara

Hal ini dapat kita lihat dari kuatnya

pemerintahan Malaysia. Selain itu kondisi perpolitikan yang stabil menjadi satu kekuatan domestik Malaysia.

Selanjutnya kondisi ekonomi politik yang kuat menjadi faktor pendukung rasa percaya diri pada setiap pembuatan kebijakan baik dalam negeri ataupun luar negeri. Secara konteks internasional posisi Malaysia cukup aman untuk melakukan berbagai hal guna memenuhi kepentingan nasionalnya. Artinya, apapun yang akan dilakukan Malaysia dalam pemenuhan kepentingan nasional tersebut tidak akan sampai pada penekanan sistem internasional terhadap Malaysia, dapat dilihat pada kasus Sipadan dan Ligitan yang akan kita bahas lebih lanjut.

Pembicaraan mengenai kasus Sipadan dan Ligitan dapat kita mulai dengan kondisi Politik domestik Malaysia. Kestabilan perpolitikan Malaysia dan kekompakan para pengambil keputusan di Malaysia untuk tetap mempertahankan Sipadan dan Ligitan menjadi faktor penting dari keberhasilan kalim tersebut. Selanjutnya keamanan ekonomi dan militer, dalam arti tidak ada ketergantungan yang luar biasa besar terhadap negara lain juga menjadi penentu atas klaim Sipadan dan Ligitan tersebut. Dalam hal ini tampak bahwa secara politik domestik dan ekonomi-militer Malaysia dalam kondisi yang relatif aman.

Kemudian dalam konteks internasional, klaim atas Sipadan dan Ligitan tidak akan merubah posisi strategis Malaysia di ASEAN khususnya, dan dunia internasional pada umumnya. Oleh karena itu, Malaysia dalam hal ini Perdana

Menteri Mahathir Mohammad sebagai nasionalis yang kuat dan berkeadilan.

yang dilengkapi faktor pendukung mengambil kebijakan mempertahankan klaim atas Sipadan dan Ligitan.

Adapun analisa yang lainnya, yang dapat kita ambil contoh adalah mengenai kasus pemulangan Tenaga Kerja Indonesia ilegal. Sebagai penjelasan Teori pembuatan keputusan dan Model Aktor Rasional tersebut dapat kita lihat kasus pemulangan TKI ilegal, Perdana Menteri Mahathir Mohammad menyatakan terpaksa memulangkan ratusan ribu TKI ilegal karena menurutnya kebanyakan dari mereka sering membuat masalah di Malaysia. Dalam hal ini Perdana Menteri Mahathir Mohammad merasa perlu mengambil berbagai langkah diplomatis dengan cara memulangkan para pekerja ilegal tersebut adalah: karena jumlah pekerja ilegal yang berlebihan membuat politik domestik di Malaysia menjadi kurang stabil. Dengan berkurangnya tenaga kerja ilegal ini, pemerintah Malaysia dapat mengurangi masalah-masalah yang kerap ditimbulkan oleh para pendatang ilegal tersebut. Tindakan ini diambil semata-mata untuk menyelamatkan rakyat. Tidak dipungkiri bahwa Malaysia sangat membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia, namun sebaiknya mereka adalah pendatang yang memiliki dokumen resmi dan telah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Langkah ini tentu saja didukung oleh beberapa faktor penting seperti yang dikemukakan teori pembuat keputusan yang telah disebutkan sebelumnya. Secara politik domestik Malaysia adalah negara kuat. Politik domestik Malaysia yang stabil juga mencerminkan kinerja pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohammad.

Selanjutnya kondisi ekonomi politik yang kuat menjadi faktor pendukung rasa percaya diri pada setiap pembuatan kebijakan baik dalam negeri ataupun luar negeri. Secara konteks internasional posisi Malaysia cukup aman untuk melakukan berbagai hal guna memenuhi kepentingan nasionalnya. Artinya, apapun yang akan dilakukan Malaysia dalam pemenuhan kepentingan nasional tersebut tidak akan sampai pada penekanan sistem internasional terhadap Malaysia, dapat dilihat pada kasus Pemulangan TKI ilegal dari Indonesia yang akan kita bahas lebih lanjut.

Pembicaraan mengenai kasus pemulangan TKI ilegal Indonesia dapat kita mulai dengan kondisi Politik domestik Malaysia. Kestabilan perpolitikan Malaysia dan kekompakkan para pengambil keputusan di Malaysia untuk memulangkan TKI ilegal Indonesia menjadi faktor penting dari keberhasilan klaim tersebut. Selanjutnya kemapanan ekonomi dan militer, dalam arti tidak ada ketergantungan yang luar biasa besar terhadap negara lain juga menjadi penentu atas ketegasan sikap tersebut. Dalam hal ini tampak bahwa secara politik domestik dan ekonomi-militer Malaysia dalam kondisi yang relatif aman.

Kemudian dalam konteks internasional, pemulangan TKI ilegal tidak akan merubah posisi strategis Malaysia di ASEAN khususnya, dan dunia internasional pada umumnya. Oleh karena itu, Malaysia dalam hal ini Perdana Menteri Mahathir Mohammad secara rasional juga dengan berbagai pertimbangan yang dilindungi faktor pendukung mengambil kebijakan pemulangan TKI ilegal

Dari kedua contoh diatas, ada satu ulasan lagi yang akan membuat perimbangan wacana tentang hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia. Dukungan Perdana Menteri Mahathir Mohammad terhadap Indonesia tentang kasus Timor-timur menjadi nilai positif hubungan bilateral kedua negara ini. Positif dalam hal ini adalah Malaysia sangat menghormati sikap Indonesia dalam mengatasi Timor-timur.

Hal ini bisa kita lihat pada kasus Konferensi Regional Asia Pasifik tentang Timor-timor di tahun 1996 yang melibatkan aktivis asing dari beberapa negara seperti Jepang, Filipina, Australia, dan lain-lain. Dalam konferensi tersebut Timor-timur menjadi isu utama yang mana tujuannya ingin turut campur dalam penyelesaian masalah Timor-timur.

Pada saat berlangsungnya konferensi tersebut, telah terjadi pembubaran paksa oleh pemuda UMNO, yang kemudian menimbulkan keributan. Pada dasarnya apa yang dilakukan pemuda UMNO ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah Malaysia. Dimana sebelumnya pemerintah Malaysia sudah melarang diselenggarakannya konferensi tersebut. Mengingat hal tersebut dapat merusak hubungan Malaysia-Indonesia yang telah dibina selama ini.

Dari peristiwa ini tampak sekali dukungan Malaysia pada masa pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohammad terhadap Indonesia, khususnya mengenai kasus Timor-timur.

## **F. Hipotesa**

Peningkatan hubungan bilateral Malaysia-Indonesia pada masa pemerintahan Perdana Menteri Mahathir Mohammad terjadi dalam hal:

1. Ekonomi, dalam hal ekonomi terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama dengan indikasi naiknya total perdagangan bilateral (ekspor-impor), dan investasi.
2. Politik, dalam hal politik sangat nampak perubahan pola hubungan bilateral kedua negara, yakni peningkatan kunjungan elit politik Malaysia ke Indonesia, dan sebaliknya, juga adanya kedekatan secara personal elit politik masing-masing negara.
3. Sosia-Budaya, kerjasama di bidang sosial budaya sangat nampak dalam hal pengiriman misi kesenian, pengiriman utusan dan pertukaran acara di media massa baik yang cetak maupun elektronik, dan adanya kerjasama pendidikan seperti pertukaran pelajar dan tenaga pengajar.
4. Pertahanan dan Keamanan, terjadi peningkatan contohnya dalam hal mengamankan wilayah laut yang berbatasan langsung dengan kedua negara, adanya peningkatan latihan militer bersama kedua negara. Dan juga komitmen untuk membendung terorisme

## **G. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan yaitu data dari buku-buku, literatur-literatur, makalah-makalah ilmiah, koran, majalah, serta data yang di *download* dari situs-situs di internet.

## **H. Jangkauan Penelitian**

Membatasi suatu permasalahan penelitian mempunyai arti penting karena kecenderungan pembahasan masalah yang tidak seksama dan kemungkinan terjadinya penyimpangan dan pelebaran masalah dapat diatasi. Maksud adanya ruang lingkup penelitian adalah agar sesuai dengan masalah yang dibahas, serta memudahkan penulis dalam mengatasi kesulitan mencari data.

Dalam penelitian ini penulis akan memulai penelitian dari awal masa pemerintahan Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohammad pada tahun 1981 hingga berakhirnya masa pemerintahannya pada akhir tahun 2003. Karena pada masa Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohammad, Malaysia banyak mengalami kemajuan yang sangat pesat disegala bidang, terutama pada bidang ekonomi, teknologi dan komunikasi.

## **I. Sistematika Penulisan**

Bab I atau bab pendahuluan merupakan ringkasan singkat dari keseluruhan bab yang ada. Di dalamnya berisi alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemilihan dan hipotesa yang nantinya akan digunakan sebagai *frame of reference* bagi penulis untuk

menyusun bab selanjutnya, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan, dan rencana penulisan.

Bab dua berisi pembahasan mengenai Malaysia yang dimulai dengan gambaran umum Malaysia, kelompok-kelompok kepentingan dan partai politik di Malaysia. Dalam bab ini akan dibahas pula proses politik yang terjadi di Malaysia karena sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan penting terhadap kepentingan atau *preferences* Malaysia sendiri. Selain itu juga berisi tentang biografi, peran dan strategi Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohammad sebagai tokoh kunci dan sentral dalam pembangunan dan pelaksana kebijakan-kebijakan pemerintah Malaysia dalam melaksanakan dan memenuhi kepentingan-kepentingan Malaysia terhadap Indonesia. Termasuk juga pandangan Mahathir terhadap Indonesia.

Bab tiga berisi peningkatan yang terjadi di dalam hubungan bilateral Malaysia-Indonesia di bidang Ekonomi. Mulai dari peningkatan neraca pembayaran, ekspor dan impor, sampai dengan peningkatan investasi. Pembahasan ini sangat penting untuk diletakkan pada bab tersendiri atau bab tiga mengingat masalah ekonomi relatif memberikan dominasi dalam dinamika hubungan bilateral Malaysia dan Indonesia.

Bab empat berisi penjelasan mengenai peningkatan yang terjadi di bidang Politik, Sosial-Budaya, dan Pertahanan-Keamanan. Di bidang Politik misalnya Peningkatan Kunjungan Politik, Pengakuan Malaysia terhadap Wawasan Nusantara, Peningkatan kerjasama dalam pengadaan tenaga kerja, Pembentukan Komisi Bersama Malaysia-Indonesia, Keselarasan persepsi dalam Forum

peningkatan pada kegiatan seni budaya, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, keagamaan, kesehatan, dan sebagainya. Sedangkan di bidang pertahanan-keamanan dapat dilihat peningkatan dalam hal kerjasama militer, kerjasama dalam menentukan batas wilayah, kerjasama dalam menanggulangi terorisme internasional, dan lain-lain. Bab tiga dan bab empat ini akan menjadi jawaban bagi pokok permasalahan yang dibahas pada penulisan skripsi ini.

Dalam bab penutup penulis memberikan kesimpulan akhir dari penelitian skripsi ini yang memuat kesimpulan akhir dari penelitian ini.